

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM :  
KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL**

Oleh:

Bobi B. Setiawan

Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Gajah Mada

**RINGKASAN**

Paper ini menyoroti salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya alam yakni keadilan lingkungan atau “ environmental rights and justice.” Berangkat dari pandangan “ political ecology” paper ini melihat bahwa negara mempunyai peran penting dalam proses akumulasi atas pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh sekelompok kecil kapital disatu sisi, serta proses marginalisasi masyarakat lokal di sisi lain. Isu tentang “ environmental rights and justice” harus terus diperjuangkan, antara lain dengan mengkedepankan persoalan “ property rights” masyarakat lokal dan petani agar mereka tidak terus termarginalisasi oleh proses globalisasi dan perdagangan bebas. Reformasi pengelolaan sumber daya alam menjadi satu keharusan untuk menjamin “ property rights” masyarakat lokal dan petani. Kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal tidak perlu dipertentangkan oleh karena keduanya merupakan satu koin dengan dua sisi.

### **PENGELOLAAN LINGKUNGAN: EFISIENSI SUMBERDAYA ATAU "ENVIRONMENTAL JUSTICE?"**

Kata pengelolaan banyak diartikan sebagai upaya sadar dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Dalam konteks lingkungan, pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai upaya terpadu untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan penurunan kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program-program pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Soemarwoto (1985) sebagai misal mendefinisikan pengelolaan lingkungan sebagai "usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi sebaik-baiknya." Sementara Omara-Ojungu (1991) mendefinisikan pengelolaan lingkungan sebagai "suatu proses pengambilan keputusan bersama dimana solusi optimal harus diambil berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya" .

Rumusan diatas bukannya salah, akan tetapi memerlukan peninjauan kritis terutama berkaitan dengan tujuan pengelolaan lingkungan itu sendiri. Dalam banyak tulisan, tujuan pengelolaan lingkungan diarahkan untuk mencapai apa yang disebut sebagai sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Persoalannya adalah bagaimana kita menginterpretasikan ide pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Dalam banyak tulisan, pembangunan berkelanjutan diartikan atau dirumuskan sebagai paradigma pembangunan yang diarahkan untuk tidak saja memenuhi kebutuhan generasi saat ini melainkan juga generasi mendatang. Rumusan ini cenderung bersifat sangat umum sehingga mengundang

berbagai interpretasi dan kritik. Bagian ini tidak akan mengkaji berbagai perkembangan pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan, akan tetapi akan meringkas ide-ide dasar yang banyak didiskusikan, yang secara umum dapat diringkas menjadi lima butir sebagai berikut.

Pertama, konsepsi pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya 'integrasi' antara ide-ide 'pembangunan' dan 'lingkungan' yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. Kedua, pembangunan berkelanjutan berpijak dari pandangan bahwa konsepsi tentang pembangunan tidaklah cukup hanya diartikan sebagai 'pertumbuhan' ekonomi semata melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti yang lebih luas dan dalam antara lain menyangkut kualitas hidup dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Ketiga, konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terdapatnya batas-batas teknologi dan lingkungan untuk mendukung proses pembangunan yang tidak terkontrol. Keempat, konsepsi pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya aspek sosial-politik, khususnya keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tak terpisahkan dari persoalan-persoalan lingkungan. Dan terakhir, atau kelima, konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari adanya ketimpangan situasi dan dengan sendirinya juga sasaran dan prioritas pembangunan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Ringkasnya, perkembangan pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan saat ini mengkristal pada disepakatinya dua prinsip utama pembangunan yakni pelestarian lingkungan (yang meliputi pula efisiensi sumber daya) dan keadilan serta

kesejahteraan sosial (Redclift, 1987). Debat tentang pembangunan berkelanjutan yang selama ini hanya menekankan aspek pelestarian lingkungan dengan sendirinya kurang memadai, oleh karena sejauh terjadi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya berarti tujuan pembangunan yang berkelanjutan itu sendiri tidak akan tercapai. Isu “ environmental justice” dan “ environmental right” merupakan dimensi penting pembangunan berkelanjutan sehingga dengan sendirinya pengelolaan lingkungan juga ditujukan ke persoalan ini (Eckersley, 1992).

### **PENDEKATAN “POLITICAL ECOLOGY” DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM**

Terdapat beberapa pendekatan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya. Mitchell (1997) menjelaskan paling tidak terdapat lima pendekatan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

#### **Pendekatan Ekologis**

Pendekatan ekologis dalam pengelolaan lingkungan dapat didefinisikan sebagai pengalokasian dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis, terutama hubungan-hubungan antar berbagai komponen dalam satu sistem lingkungan fisik dan biologis (Soemarwoto, 1985). Pendekatan ekologis dalam pengelolaan lingkungan dikembangkan oleh para ahli biologi, botani, dan juga geografi, serta menekankan perhatiannya pada sistem-sistem lingkungan alam. Sebagaimana didefinisikan oleh Bocking (1994) oleh karena pendekatan

ekologis menekankan kaitan yang erat antara berbagai jenis makhluk hidup dan lingkungan fisik mereka, maka berbagai strategi dalam pendekatan ekologis dalam pengelolaan lingkungan juga didasarkan atas proses-proses yang terjadi dalam lingkungan alam antara lain: hirarkhis biologis, integritas ekologis, suksesi, serta keseimbangan ekologis.<sup>1</sup>

Sementara pendekatan ekologis terus dirasa penting untuk memahami proses-proses perubahan lingkungan alam, pendekatan ini mempunyai kekurangan, terutama ketidak mampuannya menjelaskan komponen lain sistem lingkungan yakni sistem sosial serta proses interaksi antara komponen manusia dengan komponen fisik. Dengan kata lain, pendekatan ekologis dianggap kurang mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan baru lingkungan, khususnya proses-proses perubahan lingkungan dimana intervensi manusia begitu dominan.

### **Pendekatan Ekonomis**

Pendekatan ekonomis didasarkan atas pemikiran tentang kelangkaan sumber daya dan lingkungan sehingga menuntut para pengguna sumber daya dan lingkungan untuk melakukan pilihan-pilihan yang seksama dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dengan kata lain, pendekatan ekonomis dalam pengelolaan

---

<sup>1</sup> Pendekatan daya dukung alam (*carrying capacity concepts*), tapak ekologis (*ecological footprint*) oleh Rees (1996), atau analisa agro-sistem (*agroecosystem analysis*) oleh Conway (1985) merupakan contoh model pengelolaan lingkungan yang didasarkan atas pendekatan ekologis.

lingkungan menekankan pada perhitungan-perhitungan rasional dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan dalam kerangka sistem ekonomi yang terbuka dan kompetitif.<sup>2</sup>

Kritik pertama pendekatan ini menyangkut nilai relatif perhitungan-perhitungan untung rugi yang dilakukan. Dengan kata lain, oleh karena sifat untung-rugi suatu studi kelayakan tidak bersifat mutlak dan tergantung dari nilai pasar, pendekatan ini dianggap kurang sempurna. Kedua, pendekatan ekonomis dianggap tidak mampu sepenuhnya memasukkan nilai-nilai yang tak terukur dari kualitas dan komponen lingkungan. Ketiga, pendekatan ini juga tidak memasukkan dimensi waktu secara akurat, terutama nilai masa lalu yang cenderung tidak dimasukkan dalam perhitungan-perhitungan ekonomis. Terakhir, dan mungkin paling penting, pendekatan ini dianggap terlalu mementingkan efisiensi sehingga mengabaikan nilai-nilai keadilan dan persamaan dalam alokasi lingkungan dan sumber daya.

### **Pendekatan Teknologis**

Pendekatan teknologis dalam pengelolaan lingkungan bekerja dengan semangat yang sama dengan pendekatan ekonomis, yakni untuk mengoptimalkan proses eksplotasi dan pemanfaatan lingkungan serta sumber daya (Rosenberg, 1974).

---

<sup>2</sup> Dalam prakteknya, kelayakan ekonomi (*benefit-cost analysis*) serta konsep 'kemauan membayar (*willingness to pay*) merupakan dua model pengelolaan lingkungan berdasar kaidah-kaidah ekonomi. Pendekatan ini mempunyai beberapa kekurangan mendasar yang secara kritis harus dikaji.

Pendekatan ini menekankan pada upaya-upaya teknologis yang memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dengan hasil yang maksimal. Dalam banyak hal, pendekatan teknologi dalam pengelolaan lingkungan berhasil mengurangi penggunaan sumber daya yang terbatas, melalui proses produksi yang efisien. Perkembangan teknologi juga memungkinkan dimanfaatkannya sumber-sumber alam lain yang selama ini terabaikan. Pendekatan teknologis mengandung beberapa kelemahan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Omara-Ojungu (1991) terdapat paling tidak enam persoalan yang muncul dari pendekatan teknologi dalam pengelolaan lingkungan. Persoalan pertama pendekatan ini adalah pada sifatnya yang tak terlepas untuk mencapai efisiensi ekonomi yang cenderung mengabaikan nilai-nilai lingkungan yang tak terukur serta prinsip-prinsip keadilan dan persamaan. Persoalan kedua berkaitan dengan tidak meratanya penguasaan teknologi antar berbagai bangsa atau kelompok masyarakat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidak-adilan dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam. Persoalan ketiga menyangkut ketergantungannya pada kapital yang pada akhirnya juga memungkinkan ketimpangan dan ketidakadilan oleh karena hanya mereka yang mempunyai kapital saja yang dapat memanfaatkan teknologi. Persoalan keempat menyangkut kemungkinan penyalahgunaan teknologi oleh sekelompok orang atau bangsa. Persoalan kelima menyangkut ketergantungan pendekatan ini pada hanya sekelompok ahli yang pada akhirnya juga mengarah pada kemungkinan penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan kelompok tertentu. Akhirnya, persoalan terakhir yang paling penting adalah kecenderungan

munculnya kultur yang terlalu mengagungkan teknologi dan melihat teknologi sebagai segala sumber pemecahan persoalan lingkungan dan peradaban manusia.

### **Pendekatan Sosio-kultural**

Pendekatan sosio-kultural menekankan pada perlunya memahami aspek-aspek sosial dan kultur masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan. Pendekatan ini merupakan jawaban atas berbagai kritik terhadap ketiga pendekatan pertama (ekologis, ekonomi, dan teknologis), terutama pada kepekaanya akan keragaman sistem sosial dan kultural di berbagai belahan dunia yang dalam banyak hal telah berhasil menunjukkan model-model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, pendekatan sosio-kultural menekankan bahwa perbedaan sistem sosial dan kultur akan mempengaruhi bentuk-bentuk masyarakat dalam memandang dan memanfaatkan lingkungan serta sumber daya.

Terutama di negara-negara berkembang, pendekatan sosio-kultural ini dianggap menjadi sangat penting, karena masih dijumpainya bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan secara lokal oleh sekelompok masyarakat. Lebih lanjut, pendekatan ini juga sejalan dengan berkembangnya perhatian terhadap isu-isu gender dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun demikian, pendekatan inipun tidak lepas dari kritik. Kritik utama yang seringkali muncul menyangkut keterbatasan pendekatan ini untuk direplikasi serta kemungkinannya untuk menyelesaikan persoalan lingkungan global. Penelitian dan kajian yang kritis perlu terus dilakukan agar pendekatan sosio-kultural dapat mengantisipasi dan memecahkan persoalan lingkungan global.

### **Pendekatan Sosial-Politis**

Pendekatan sosial-politis dalam pengelolaan lingkungan didasarkan atas pemikiran tentang beragamnya kelompok-kelompok kepentingan dalam pengelolaan lingkungan yang masing-masing mempunyai persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Dengan kata lain pendekatan ini menyadari pluralitas sistem sosial-politis sebagai komponen utama lingkungan serta implikasinya bagi proses-proses perubahan dan pengelolaan lingkungan. Sebagaimana dikemukakan Bryant (1992) diperlukan apa yang ia sebut sebagai konsep " politik ekologi" (*political ecology*) yakni upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks daripada sekedar sistem bio-fisik, yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam satu masyarakat (Eckersley, 1992). Pendekatan *political ecology* membantu untuk memahami lebih jauh proses sebab akibat perubahan lingkungan serta mengapa terjadi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya.<sup>3</sup>

Pendekatan ini sangat penting dipahami oleh karena melalui pendekatan ini kita dapat melihat isu-isu pengelolaan lingkungan dalam perspektif yang lain, khususnya menyangkut isu " environmental justice" dan " environmental right"

---

<sup>3</sup> Dalam prakteknya, pendekatan sosial-politis dalam pengelolaan lingkungan menuntut kita untuk memahami tiga komponen utama sistem sosial-politik: (1) sistem mikro yakni dinamika internal masyarakat atau komunitas; (2) sistem makro yakni dinamika sistem pengorganisasian kekuasaan oleh negara, termasuk sistem hukum, azas negara, dan kelembagaan negara; serta (3) dinamika interaksi antara sistem mikro dan makro, yakni bagaimana hubungan antara masyarakat/komunitas dan negara berlangsung.

yang termasuk di dalamnya partisipasi, demokrasi, kesetaraan gender dalam penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya. Mengkesampingkan pendekatan politis dalam pengelolaan lingkungan berarti mengabaikan salah satu dimensi penting pengelolaan lingkungan yakni keadilan sosial.

### **PEMBANGUNAN KAPITALISME DAN MARGINALISASI MASYARAKAT LOKAL**

Menengok kembali perjalanan kebijakan dan pembangunan nasional selama ini, khususnya di sektor agraria, kita dapat mengatakan bahwa justru pemerintahlah yang menjadi instrumen penting dalam proses marginalisasi masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan kapitalisme di sektor agraria yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan termarginalisasinya masyarakat lokal di Indonesia. Fauzi (1999) menjelaskan bahwa paling tidak terdapat tiga program pembangunan utama pemerintah yang memfasilitasi proses tersebut yakni: (1) revolusi hijau; (2) eksploitasi hutan; dan (3) pengembangan agro industri.

Sebagaimana telah banyak didokumentasikan oleh kelompok-kelompok LSM yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), proses revolusi hijau yang dipacu sejak orde baru memang telah berhasil meningkatkan produksi makanan, khususnya beras secara kuantitatif. Meskipun demikian, proses tersebut sebenarnya tidak benar-benar mengangkat kesejahteraan petani, khususnya petani miskin dengan kepemilikan tanah kecil serta buruh tani. Proses sentralisasi pengambilan keputusan serta pengelolaan input dan proses produksi oleh lembaga

pemerintah (mulai dari benih, pupuk, pemasaran dll.) menyebabkan proses pelemahan institusi dan individu masyarakat petani. Petani sama sekali tidak mempunyai kontrol dalam keseluruhan proses pemanfaatan tanah, sementara institusi asli masyarakat petani yang mandiri dipinggirkan dan diganti dengan institusi baru yang sentralistis dan otoriter (Husken dan White, 1989).

Program eksploitasi hutan yang digenjut sejak orde baru juga jelas-jelas menunjukkan proses kapitalisme yang tak terkontrol di bidang pemanfaatan sumber daya yang mempunyai implikasi pada proses marginalisasi masyarakat lokal. Khususnya sejak diundangkannya UU.No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dimulailah proses sentralisasi pengelolaan hutan oleh pemerintah. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang berlebih pada pemerintah untuk memberikan Hak Penguasaan Hutan (HPH) pada pihak swasta (dalam maupun luar negeri); biasanya dilakukan dengan mengabaikan hak-hak penduduk lokal. Sebagaimana telah banyak didokumentasikan dalam berbagai tulisan, proses eksploitasi hutan, khususnya melalui pemberian HPH, ini tidak saja menjadi penyebab kerusakan jutaan hektar hutan di Indonesia, melainkan juga tidak memberi kesempatan berkembangnya masyarakat lokal sebagai pemilik utama sumber daya. Hak-hak masyarakat adat sama sekali tidak mendapat tempat dalam proses eksploitasi hutan ini.

Program pembangunan agro industri dan pertambangan juga menunjukkan proses kapitalisme sektor agraria yang hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat, khususnya mereka yang memiliki modal dan kekuasaan. Di bidang

agro-industri, khususnya melalui Program Perusahaan Inti Rakyat (PIR) telah terjadi proses penetrasi pemilik modal besar terhadap petani-petani kecil melalui hubungan yang seakan-akan saling menguntungkan, akan tetapi sesungguhnya sangat eksploitatif. Lebih lanjut, proses pembangunan di bidang pertambangan juga memfasilitasi tidak saja kerusakan lingkungan tetapi juga menghilangkan kesempatan penduduk lokal untuk mengenyam manfaat sumber daya yang mereka miliki. Kasus Freeport tentunya merupakan kasus nyata yang menunjukkan proses eksploitasi sumberdaya alam yang mengabaikan kepentingan penduduk lokal.

Singkatnya, proses-proses pembangunan yang selama ini dilakukan justru memfasilitasi proses penetrasi kapital pada petani lemah dan masyarakat lokal. Negara, dengan kekuasaannya yang terlalu besar, didukung oleh perangkat hukum (UUPA 1960, UU Kehutanan 1967 dll.) serta difasilitasi oleh struktur birokrasi yang kuat dan otoriter, diback-up oleh kekuatan politik dan militer yang begitu besar, menjadi instrumen penting dalam proses pelemahan dan marginalisasi masyarakat lokal. Kita bisa berbicara banyak tentang pembangunan berkelanjutan sebagai satu tujuan pengelolaan lingkungan, akan tetapi, apabila proses kapitalisme agraria sebagaimana diilustrasikan di atas tidak dikoreksi dan dikontrol, ide pembangunan berkelanjutan jelas akan tidak mungkin diwujudkan.

### **KUNCI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM: PEMILIKAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**

Terdapat paling tidak empat alasan mengapa persoalan tanah menjadi fundamental dalam pengelolaan lingkungan. Pertama, tanah merupakan media lingkungan utama yang tak bergerak sehingga nilai keberadaannya tak tergantung. Kedua, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengandalkan tanah sebagai aset utama produksi, baik di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Ketiga, sebagian besar masyarakat Indonesia belum mempunyai skill yang cukup untuk bekerja di sektor-sektor sekunder dan tertier yang relatif tidak tergantung pada tanah sebagai faktor utama produksi. Keempat, perbandingan antara luas tanah dan jumlah manusia di Indonesia yang semakin mengecil yang mengakibatkan semakin krusialnya persoalan tanah. Keempat alasan di atas memberi dasar bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan akan ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan pertanahan.

Sebagaimana diketahui, persoalan pertanahan di Indonesia diwarnai dengan persoalan klasik yang sampai kini tak terselesaikan, yakni ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh sekelompok kecil masyarakat yang memiliki modal/kapital. Tidak saja bahwa proses akumulasi pemilikan dan pemanfaatan tanah ini tidak sehat, ia juga menyebabkan proses marginalisasi banyak masyarakat-masyarakat lokal, baik secara ekonomi, sosial, kultural, dan politis. Sederet kasus banyak dikemukakan mulai dari Aceh sampai Papua, intinya adalah proses ini tidak mendapat perhatian yang selayaknya dari pemerintah,

terutama karena pemerintah itu sendiri merupakan bagian penting dari sistem yang menyebabkan terjadinya proses marginalisasi tersebut.

Dalam konteks ini perlu dicatat bahwa perhatian khusus harus diberikan pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang diundangkan sejak tahun 1960. Sebagaimana telah banyak dikaji oleh KPA, diperlukan koreksi total terhadap UUPA dan seluruh bangun hukum pertanahan di Indonesia, karena mereka justru telah menjadi instrumen penting proses eksploitasi sumber daya alam dan marginalisasi masyarakat lokal. Dengan kata lain, reformasi pertanahan nasional diperlukan oleh karena kondisi eksisting yang ada tidak menjamin “property rights” masyarakat lokal dan petani. Paling tidak empat alasan mengapa reformasi pertanahan menjadi krusial dalam konteks pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Pertama fakta bahwa kerangka perundangan pertanahan selama ini terbukti justru memfasilitasi penetrasi kapital pada masyarakat lokal dan petani. Sebagaimana telah diilustrasikan di atas, kerangka perundangan pertanahan yang ada sama sekali tidak mampu bertahan terhadap proses eksploitasi sumber daya yang tak terkontrol dan marginalisasi masyarakat lokal dan petani. Kedua, pemberian kekuasaan yang terlalu besar pada pemerintah dalam penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. Ketiga, bias terhadap negara sebagai penguasa tunggal yang diharapkan berlaku budiman dan menjamin penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah untuk semakmur-makmurnya kesejahteraan rakyat. Keempat, praktek politik pertanahan yang tidak suportif terhadap masyarakat lokal dan petani. Hal ini terbukti dengan berbagai bentuk kolaborasi antara pemerintah

dengan kapital yang cenderung sangat eksploitatif terhadap masyarakat lokal dan petani.

### **DESENTRALISASI, OTONOMI DAERAH DAN "ENVIRONMENTAL JUSTICE"**

Sebagaimana diketahui, proses desentralisasi dan otonomi daerah telah diawali dengan diundangkannya UU no. 22 tahun 1999. Terdapat beberapa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berlakunya kedua UU tersebut. Dalam konteks persoalan pengelolaan sumber daya yang basisnya adalah pengelolaan tanah yang efisien dan adil, otonomi daerah paling tidak akan membuka peluang bagi daerah untuk melakukan negosiasi dan perlawanan dengan pusat yang selama ini berkolaborasi dengan kapital untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia lokal.

Meskipun demikian, otonomi daerah tidak menjamin secara langsung kesejahteraan masyarakat lokal dan petani karena otonomi daerah tidak memberikan perhatian yang khusus terhadap isu penting pengelolaan lingkungan yakni masalah " environmental justice" yang menyangkut hak-hak rakyat dan masyarakat lokal. Dengan kata lain, proses desentralisasi tidak akan membawa banyak manfaat apabila ia tidak melihat urgensinya pembaharuan dan reformasi pertanahan sebagai syarat mutlak pengelolaan sumber daya yang adil. Diperlukan kesadaran dan kemauan politik pemerintah daerah untuk mengagendakan reformasi pertanahan di daerah yang bertujuan untuk menjamin hak-hak hidup

masyarakat lokal/daerah, khususnya melalui jaminan atas kontrol dan akses terhadap tanah sebagai sumber utama produksi sebagian besar masyarakat lokal.

### **KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL: DARI IDE KE GERAKAN**

Sebagaimana dikemukakan oleh Eckersley (1992) kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya merupakan satu koin dengan dua sisi. Yang penting menurut Eckersley adalah bagaimana kita memilih pendekatan yang paling pas untuk memadukan keduanya. Dalam konteks negara-negara berkembang, Eckersley menawarkan bahwa pendekatan “human welfare ecology” mungkin paling tepat. Pendekatan ini menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila kesejahteraan masyarakatnya terabaikan. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat hanya akan dicapai apabila terjamin “environmental justice”

Akhirnya, perlu disadari bahwa ide untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal perlu ditransformasikan menjadi strategi dan gerakan. Dua hal penting dilakukan dalam konteks ini.

Strategi pertama adalah dengan melakukan perubahan struktural kerangka perundangan dan praktek politik pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang lebih memberikan peluang dan kontrol bagi daerah, masyarakat lokal, dan petani untuk mengakses sumber daya alam. Strategi ini sangat krusial, terutama menyangkut perubahan substansi hukum yang berkaitan dengan sumber daya

alam (antara lain: pertanahan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan) yang lebih memihak pada masyarakat lokal dan petani dan membatasi kewenangan negara yang terlalu berlebihan. Pada tataran praktek politiknya, perubahan ini menuntut peninjauan kembali hubungan-hubungan antara negara, kapital, dan masyarakat sipil, khususnya untuk lebih mengurangi kolaborasi negara dengan kapital.

Strategi kedua adalah penguatan institusi masyarakat lokal dan petani. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Wiradi (1991) proses politik agraria selama ini yang cenderung memihak pada kapital dan politik pembangunan negara telah menjadikan masyarakat lokal dan petani sebagai kelompok yang tertindas, marginal, dan tuna kuasa. Mengingat hal ini, proses penguatan institusi masyarakat lokal dan petani menjadi kemutlakan, oleh karena tanpa itu mereka akan tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan negosiasi dan perlawanan berkaitan dengan perjuangan mereka akan hak terhadap sumber daya.

Perlu dicatat disini bahwa dua strategi di atas tidak dapat dilihat secara terpisah melainkan sebagai satu kesatuan yang sinergis. Perubahan struktural perundangan dan politik pengelolaan sumber daya alam saja tidak cukup apabila masyarakat lokal dan petani terus tak diberdayakan. Sebaliknya, penguatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dan petani saja juga tidak cukup apabila tidak disertai perubahan kerangka hukum yang menyeluruh. Sebagaimana dikemukakan oleh Fakhri (1999), perubahan kerangka hukum saja tidaklah cukup, diperlukan kesadaran dan ketrampilan politik rakyat, khususnya masyarakat lokal dan petani, untuk terus memperjuangkan hak-hak hidup dan sumberdaya mereka. LSM dan

organisasi sosial lain mempunyai peran yang sangat krusial untuk meningkatkan ketrampilan politik rakyat dalam memperjuangkan “ *environmental justice and rights.*”

### Bahan Bacaan

Bachriadi D, dkk (editor) 1999. *Reformasi Agraria*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Bocking, S. 1994. “ Visions of Nature and Society: A History of the Ecosystem Concept” . *Alternatives* 20 (3): 12-18

Bryant, R.L., 1992. “ Political Ecology: an Emerging Research Agenda in Third World Studies” . *Political Geography* 11 (1): 12-36

Eckersley, Robyn, 1992. *Environmentalism and Political Theory: Toward and Ecocentric Approach*. New York: State University of New York Press.

Fakih, M dkk. (editor). 1999. *Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat*. Yogyakarta: Insist

Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist, KPA, dan Pustaka Pelajar

Greer, J. dan Kenny Bruno. 1999. *Kamufase Hijau. Membelah Ideologi Lingkungan Perusahaan-perusahaan Transnasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Husken dan White. 1989. " Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa." *Prisma*, No. 4, 1989.

Mitchell, Bruce, 1997. *Resource and Environmental Management*. England: Addison Wesley Longman Limited.

Redcliff, M., 1987. *Sustainable Development Exploring Contradictions*. London: Methuen.

Wiradi, Gunawan (1991) " Reformasi Agraria: Masalah dan Relevansinya dengan Pembangunan Jangka Panjang: Suatu Pandangan ke Depan." Makalah tak dipublikasikan, Jakarta: Sekretariat Bina Desa.

## **NOTULEN DISKUSI**

### **SESI PERTAMA**

#### **PENGANTAR DISKUSI:**

Dr. Bustanul Arifin  
Dr. Achmad Suryana  
Dr. Nesim Tumkaya

#### **MODERATOR:**

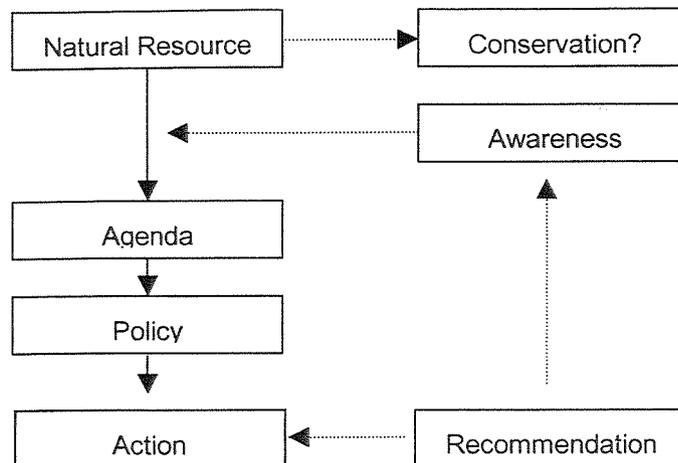
Dr. Bayu Krisnamurthi



#### **Moderator :**

- Kita rangkumkan beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan dapat dijawab siang ini, yaitu :
  1. Apa yang akan kita buat dengan pertumbuhan penduduk? Bagaimana dengan distribusi penduduk?
  2. Bagaimana proses produksi? Apakah terlalu ekstensif? Seperti apa polanya?
  3. Bagaimana dengan pola konsumsi? Bagaimana sikap kita dan kebijakan yang ada?

4.



#### 1. Sitorus, Jurusan Tanah

- Topik pada lokakarya ini sebenarnya adalah topik lama.
- Kebijakan makro yang dilaksanakan sekarang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, sehingga jika ditangani secara sungguh-sungguh akan mewujudkan keberhasilan Indonesia dalam mengurangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Hal ini telah terbukti pada tahun 1970-an.
- Berkaitan dengan degradasi lingkungan, anggapan selama ini tentang cukupnya sumber daya alam mengakibatkan penanganan tidak sungguh-sungguh.
- Jika tekanan penduduk tidak dikontrol maka akan menimbulkan dampak yang sangat hebat terhadap lingkungan. Tetapi bisa 'kan kita membalik

keadaan tersebut dengan menjadikan penambahan penduduk untuk membangun lingkungan yang lebih baik?

- Selama ini yang terjadi dalam penanganan pangan, terutama dalam produksi pangan, pemerintah lebih bersungguh-sungguh dalam mengelola *wet land area* dibandingkan dengan *dry land area*.
- Mengapa pemerintah tidak memberi input subsidi tanah?
- Buat rencana tata ruang mulai dari kabupaten/kota, propinsi dan nasional.
- Proyek sejuta hektar lahan gambut dahulu memang merupakan kesalahan. Lahan tersebut adalah kawasan lindung. Tetapi sebaliknya rehabilitasi sawah pasang surut yang telah memiliki potensi tidak "dilihat" secara baik. Hal ini disebabkan oleh *law/force/policy* makro yang berlaku, sehingga walaupun menyimpang dari kaidah jika *policy* mengizinkan maka terjadilah hal tersebut.

## 2. Prof. Rizal Syarief, LPM IPB

- Hanya ingin menekankan/mengingatnkan bahwa diskusi ini telah baik sekali, tetapi ada beberapa kritikan.
- Mengenai *common flat home* , jangan dibiarkan Deptan berjalan sendiri. Mengapa banyak alternatif solusi tidak dilakukan? Misalnya mengapa LAPAN tidak membuat roket gas CO2 untuk menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi pada waktu lalu. Begitu ada kebakaran hutan, kita malah mempolitisi supaya ada bantuan dari negara lain. Kenapa IPTN tidak diarahkan untuk pesawat pertanian? terlepas dari *feasible*tidaknya. Paling tidak ada pemikiran seperti itu. Jika *common flat home*, berarti dititik mana

kita harus letakkan dalam agenda *policy action* ini, yang bukan di tingkat nasional tapi daerah (desentralisasi).

- Kita sering mendengar adanya *malay culture, indian culture*, dsb. Lalu *indonesian culture* sekarang citranya bukan lagi “banyak bicara sedikit bekerja” tapi: “yang dikerjakan lain dengan yang dibicarakan”. Jadi kalau *policy action* seperti itu, kita akan sia-sia bicara banyak pada forum ini.
- Penekanan kepada pemerintah daerah (daerah membangun) dijadikan sasaran tembak dari agenda *policy action* ini. Jangan *policy* yang bersifat makro tapi lebih bersifat sebagai *guidance* yang ada strategi dan taktisnya. Contoh, Kecamatan Baki di Sukoharjo telah mekanisasi *minded*, kenapa? Padahal daerah itu paling padat penduduknya di Indonesia bahkan mungkin di dunia per Km-nya. Jadi seakan tidak ada korelasi antara jumlah penduduk dengan mesin. Lalu kasus di China yang *galengannya* berukuran lebar 1 – 1.5 m walaupun penduduknya sangat padat. Kita ingin hal-hal semacam ini dijadikan kebijakan di pemerintah daerah/tingkat-tingkat daerah, yang tentu saja dengan keunggulan lokalnya. Sehingga tingkat kesuksesan di tingkat mikro menjadi banyak.

### 3. Prof. Bunasor Sanim, MMA IPB

- *Core problem* yang sebenarnya berada pada lahan itu sendiri, karena nanti akan ada tambahan dari masalah air, lingkungan, dsb sampai dengan *major diversity*-nya.
- Jika mencermati degradasi lingkungan, berdasarkan *empirical experiences* ditemukan ada dua kondisi, yaitu luar hutan dan dalam hutan. Dalam hutan

sendiri ada eksploitasi oleh pemegang HPH dsb, lebih parah lagi yang di luar hutan yang penyebabnya bukan semata-mata penduduk tetapi penggunaan SDA yang tidak efisien.

- Upaya bagaimana supaya ketahanan pangan tercapai berkaitan dengan masalah degradasi lingkungan, sehingga kebijakan makro dan mikro sangat relevan sekali.
- Pertanyaan untuk Pak Tumkaya, pertama, secara global pembangunan ekonomi tanpa manajemen lingkungan adalah *undermind*, dan sebaliknya manajemen lingkungan tanpa pembangunan ekonomi akan gagal. Kedua, pembangunan ekonomi dan manajemen lingkungan *is single agenda*. Pada kondisi seperti apa hal itu terjadi? Sementara paham kita selama ini adalah pembangunan ekonomi akan merusak lingkungan, dan manajemen lingkungan akan memcegah pertumbuhan penduduk.

4. Ir. Budi Gunawan, PPSDA UNPAD

- Berdasarkan paparan dari pemakalah, baik Pak Arifin maupun Pak Achmad yang mengatakan bahwa pengembangan *on farm* dan perluasan wilayah pertanian adalah perlu, dengan memperhatikan kaidah-kaidah ramah lingkungan.
- Ada kesenjangan antara kondisi pada tingkat mikro dengan tingkat makro, khususnya kebijakan yang diterapkannya.
- Ketersediaan pangan memang ada, tapi sekarang masalahnya adalah daya beli masyarakat yang menurun.

- Akibat erosi tanah/pertanian sebanyak 400 ton/tahun produksi pangan menghilang. Sementara hutan hanya 16 ton/tahun.
- Program ekstensifikasi/intensifikasi pertanian sebenarnya hanya mengakibatkan homogenisasi pangan saja bukan diversifikasi pangan. Hal ini menimbulkan ekosistem berubah.
- Kebijakan tentang peningkatan produksi mengalami konflik kebijakan, misalnya yang terjadi di DAS Citarum Bandung Selatan yang diprogramkan untuk menggenjot produksi. Tetapi kenyataannya hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan.
- Peningkatan daya beli masyarakat memang harus diusahakan.

**Tanggapan Pemakalah :**

1. Dr. Nesim Tumkaya (UNFPA)

- Mengenai pembangunan ekonomi dan manajemen lingkungan, adalah dua hal yang saling berpengaruh/*link* satu sama lain. Juga sangat mudah sekali menggabungkan antara keduanya, seperti kasus di Filipina.
- Perlu sekali untuk memaksa hukum agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih sehingga pembangunan ekonomi maju.

2. Dr. Bustanul Arifin (INDEF)

- Kasus *sustainable development* ditambah poin-nya satu lagi oleh Pak Emil Salim yang telah bekerja keras mempertajam agenda Rio De Jenerio. Kasus *sustainable development is nonsense* tanpa melibatkan faktor sosial seperti

kepemilikan lahan, akses, dsb. Itu menjadi fokus dalam agenda kita. Kita tahu jawabannya tapi tidak tahu bagaimana mengerjakannya? Tadi kita mempercayai bahwa apabila semua dibebankan akan menimbulkan *policy failed*, padahal faktor penyebabnya bukan hanya unsur pemerintah juga hal lain seperti faktor sosial, dsb. Sehingga sebaiknya solusi dijadikan *action* di bidang masing-masing

- TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), yang terjadi sekarang adalah "Tebang Pasti Tanam Insya Allah".
  - Setuju dengan pendapat Pak Budi Gunawan dan Pak Bunasor Sanim.
3. Dr. Achmad Suryana (BBKP-Deptan)
- Solusi komprehensif sesuai dengan aspek pengelolaan lingkungan.
  - Sama dengan pendapat Pak Rizal bahwa *design* apapun untuk menangani isu-isu tersebut harus dapat dilakukan di daerah tidak sekedar konsep-konsep di pusat/nasional.
  - Teknologi pertanian konservasi sudah tidak terdengar lagi, baik di Perguruan Tinggi maupun di kalangan Pusat dan masyarakat. Teknologi ini sebaiknya tidak diperbaiki unsur teknisnya namun juga harus dapat dipercepat daya adopsinya bagi masyarakat.
  - Rendahnya *Law Enforcement* di seluruh bidang di Indonesia memerlukan perbaikan yang sangat menguras energi, seperti halnya dengan pemberantasan korupsi.

**Moderator :**

**Dr. Bayu Krisnamurthi (Kepala PSP-IPB)**

- Selama perbincangan ini, baik yang berasal dari pemakalah maupun komentar dan saran dari forum, hal yang banyak dibicarakan adalah mengenai produksi dan konservasi. Tapi aspek konsumsi belum ada yang berkomentar?
- Aksi- aksi yang disarankan dari diskusi ini biasanya harus belajar dari pengalaman.

**Peserta:**

**1. Dr. Bobby, UGM**

- Empat pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator dinilai terlalu teknokratis.
- Akses pada pasar tentu banyak masalahnya yang dihadapi oleh para pelaku pertanian.
- Terdapat satu agenda, bagaimana pola-pola pemilikan lahan dan sumber daya alam?

**2. Prof. Wani, UNIBRAW-Malang**

- Bukan masalah baru lagi jika apa yang kita kerjakan tidak seperti yang diprogramkan sebelumnya.
- Hal yang disampaikan oleh Pak Achmad mengenai Agribisnis Kerakyatan memang merdu didengar, namun sekarang sudah tidak efisien lagi karena tidak pernah dilakukan secara kongkrit.
- Jika ada persaingan, sebaiknya dilakukan dengan *fair/adil*

- Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan terjadinya perbedaan produksi pertanian, hal ini dapat mengakibatkan validitas data yang berbeda pula.

### 3. Yusman

- Masalah kependudukan dan konservasi lebih banyak pada kebiasaan manusia dan lebih sulit aksesnya ke pemerintah.
- Mendukung ekstensifikasi pertanian.
- *Land tax* agar diproporsionalkan, misalnya di luar negeri tanah bera/yang tidak dipergunakan pajaknya lebih besar daripada tanah produktif.
- Sebaiknya diadakan pembagian lingkungan, seperti kawasan industri, kawasan permukiman dll. Hal ini untuk menjaga ekosistem.
- Pelaksanaan otonomi daerah banyak yang menyebabkan degradasi lingkungan, Hal ini biasanya banyak Kepala Desa yang merusak lingkungan untuk meningkatkan APBD-nya. Sehingga sebaiknya lingkungan ini dikelola oleh suatu badan otorita yang punya aturan dan tanggung jawab yang jelas.

### 4. Hermanto

- Kita harus dapat memupuk nilai semangat, seperti bangsa Jepang waktu di bom oleh Sekutu, mereka berikrar untuk bisa lebih maju daripada negara yang menge-bom-nya.
- Pembangunan komoditi (*commodity development*) harus mengikutsertakan rakyat (partisipasi rakyat). Masalah regional dan inter regional development sebaiknya diadakan azas tertentu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang ilegal.

**Moderator :**

**Dr. Bayu Krisnamurthi (Kepala PSP-IPB)**

- Ada satu peringatan dari Pak Nesim Tumkaya yaitu “kita tahu seluruh pertanyaan, kita tahu solusinya, tapi kita tidak tahu melakukannya”. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk pemenuhan sekarang/hari ini.
- Terdapat agenda baru : “Apa yang harus dilakukan untuk menyamakan persepsi orang-orang yang ada di dalam ruangan ini dengan orang-orang yang ada di luar ruangan ini?”

## **SESI KEDUA**

### **PENGANTAR DISKUSI:**

Dr. Deddy M. Masykur Riyadi  
Ir. Suryo Adiwibowo, MS

### **MODERATOR:**

Dr. Ir. Y. Bayu Krisnamurthi

#### **1. Parulian Hutagaol, Jurusan Sosek IPB**

Saya teruskan dengan judul lokakarya ini, yaitu tekanan penduduk, degradasi lingkungan dan ketahanan pangan. Tekanan penduduk lebih mengarah kepada jumlah penduduk dan pertumbuhannya. Sebenarnya sumber masalah adalah jumlah penduduk, tetapi persoalannya adalah kebijakan pemerintah membuat

pengaruh tekanan penduduk justru semakin memburuk. Padahal idealnya, kebijakan itu untuk mengatasi masalah. Ini yang tidak terekspose.

Kalau kita mau memahami degradasi lingkungan, sehubungan dengan ketahanan pangan, maka kita harus memahami kebijakan itu sendiri. Kenapa pemerintah harus bersusah payah mengurus ketahanan pangan? Apakah supaya masyarakat senang, atau pemerintah punya kepentingan di dalamnya. Dalam perspektif pemerintahan Orba, sebenarnya apa tujuan program swasembada pangan? Swasembada pangan itu merupakan instrument bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Sehingga apapun konsekwesinya (environmental impact) baik sekarang maupun ke depan dengan mempertahankan kondisi sekarang, tetap dilaksanakan. Karena ini merupakan instrument kekuasaan, maka persoalannya bukan melihat bagaimana implikasinya terhadap lingkungan (justru nantinya degradasi lingkungan menjadi bumerang terhadap upaya atau instrument itu sendiri), tetapi bagi pemerintah yang penting adalah dapat dilaksanakan dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Karena dari perspektif pemerintah kelanggengan kekuasaan itu adalah kumpulan dari kekuasaan-kekuasaan jangka pendek karena memakai sistem pemilu. Maka prestasi pemerintah pada periode sekarang sangat menentukan peluang berikutnya. Jadi bagi pemerintah prspektif jangka pendek adalah sangat penting. Sedangkan lingkungan adalah persoalan jangka panjang. Sehingga kebijakan swasembada beras disatu pihak ingin produksi naik, tetapi kebijakannya mempunyai bibit-bibit untuk menghancurkan kapasitas produksi nasional pada

jangka panjang. Inilah dilemanya. Kebijakan pemerintah sekarang sepertinya masuk akal, tetapi dalam jangka panjang tidak masuk akal dan counter produktif.

Ilustrasi lain adalah kenapa pemerintah harus menaikkan pajak, mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM? Yang merupakan peningkatan beban hidup masyarakat dan cost production sementara kita ingin produk lebih kompetitif. Ini adalah kepentingan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Tujuannya sama tetapi prosesnya dimanipulasi. Rasionalitasnya sederhana, yaitu bagaimana memikirkan masa depan bila saat ini saja terancam, yaitu APBN. Jadi pemerintah memikirkan swasembada pangan yang jangka pendek karena memikirkan kekuasaan jangka pendek untuk kelanggengan jangka panjang. Jadi kelihatan kebijakan pemerintah jangka pendek dengan jangka panjang saling bertentangan.

Contoh lain, irigasi dan subsidi pupuk. Irigasi dalam Orde Baru dibangun besar-besaran dan ditanggung pemerintah dan bagi masyarakat merupakan public goods. Persoalannya bagi masyarakat adalah kalau barang yang gratis, maka upaya konservasi tidak akan dilakukan. Tidak mempunyai insentif untuk melakukan konservasi dan cenderung melakukan pemborosan. Padahal irigasi untuk swasembada beras sangat kritikal, karena tidak mungkin melakukan swasembada tanpa irigasi karena merupakan faktor produksi yang dapat meningkatkan produktivitas varietas unggul. Tampak disini kontradiktifnya dan ketiadaan konservasi menjadi ancaman jangka panjang. Juga tampak bahwa sebelum Orba, masyarakat menyediakan irigasinya sendiri.

Penyediaan irigasi merupakan suatu sumber interdependensi masyarakat sehingga masyarakat cenderung *cooperative*. Hal ini penting dalam usaha mendukung konservasi lingkungan. Namun kondisi ini telah dihilangkan oleh kebijakan orde baru, seperti juga dalam kasus pupuk yang menyebabkan ketergantungan pasar sehingga terjadi perubahan motif produksi. Kalkulasi ekonomi yang ketat harus dilakukan karena dibeli dari pasar. Konsekuensinya, petani harus mengontrol proses produksinya secara ketat (pemberian irigasi yang ketat, pemberian pestisida secara ketat dan seterusnya) yang justru akan mengakitnya masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang muncul kemudian dalam jangka panjang akan membuat kapasitas produksi usaha tani menurun. Artinya petani dalam dilema, di satu pihak dihadapkan pada pemenuhan jangka pendeknya tetapi mengorbankan jangka panjangnya. Selain itu dengan kalkulus ekonomi tadi maka solidaritas dan sosialisasi masyarakat rusak, padahal *cooperativeness* sangat penting dalam rangka membina dan mengkonservasi lingkungan.

Pertanyaannya sekarang adalah ; ' Mengapa pemerintah melakukan itu? Mengapa pemerintah bisa melakukan tindakan dengan menggunakan *public power/public resources* tanpa memikirkan implikasinya jangka panjang dan juga pada masyarakat. Jawabannya mungkin karena pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam posisi ' *nothing to loose* ' , dimana ' Anda bisa bertindak apa saja yang bisa Anda dilakukan dan itu Anda berlakukan. Disinilah kelemahan kita karena yang diperlukan adalah ' *public control* ' dan itu tidak jalan. Ketahanan pangan tidak bisa dicapai tanpa melibatkan *public control* terhadap pemerintah.

## 2. Yayok Bayu Krisnamurthi (moderator) :

Workshop ini mudah-mudahan sebagai rangkaian workshop berikutnya, karena masalah degradasi lingkungan terjadi. Apabila ada motivasi pemerintah dalam konteks masalah pangan, kita harus memikirkan bagaimana memberi makan 210 juta dan bertambah 3 juta setiap orang per tahun. Dalam konteks ini tidak berarti swasembada beras, tetapi lebih kepada arah pencapaian kebutuhan pangan itu.

## 3. Ari (ITB) :

Saya ingin menyoroti Pak Dedi yang tadi mencoba mengangkat bahwa masalah ketahanan pangan bukan hanya masalah pertanian tetapi multi sektor. Apabila kita mencoba berhubungan atau 'deal' dengan masalah ketahanan pangan, artinya ada banyak hal yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan sektor-sektor lain (tadi Pak Dedi ekspresikan adanya kepentingan untuk penataan ruang, dan di dalam ruang itu sendiri di atur misalnya hubungan desa-kota). Di dalam ketahanan pangan dari tadi pagi yang dibahas adalah pertanian, petani dan lahan pertanian. Kelihatannya belum dicoba untuk melihat non pertanian, padahal kalau kita melihat telah terjadi degradasi lingkungan, penurunan kemampuan petani untuk memproduksi dan akhirnya mereka mencoba untuk berpindah ke sektor non pertanian. Hal ini banyak terjadi di perkotaan sehingga muncul kaitan desa-kota. Kalau itu masih coba kita amati di tingkat mikro, mereka akan lari pada lahan-lahan marjinal di perkotaan sehingga degradasi lahan yang terjadi dari tekanan penduduk, degradasi lingkungan pertanian, dan bagaimanapun caranya mempertahankan

ketahanan pangan di pedesaan akan berhubungan dengan degradasi lahan di perkotaan juga.

Usul dari Bapak Bowo untuk mencoba beralih paradigma dari pendekatan yang sifatnya mekanistik menjadi ekologis, saya kira sudah waktunya karena itu merupakan perilaku dan cara berfikir.

Diusulkan oleh Pak Bowo untuk menerapkan perubahan perilaku dalam pengelolaan lingkungan dalam mencoba mempertahankan keberlangsungan ketahanan pangan adalah dengan mencoba memperkuat institusi lokal. Institusi lokal merupakan suatu media agar setiap pihak terkait saling berkomunikasi sebagai mitra karena mereka seharusnya duduk dalam satu level, tidak lagi subjek-objek atau patron-klien. Mestinya kelembagaan masyarakat lokal sebagai wadah untuk melembagakan perilaku bahwa untuk menghadapi masalah ketahanan pangan harus melalui pendekatan ekologi.

#### 4. Andi Rahma (LSM Pelangi):

Di dalam transportasi berkelanjutan terdapat masalah konversi lahan. Dari paper Robert Konsvero beberapa tahun lalu, dituliskan bahwa antara Jakarta dan Surabaya dengan jarak 600 km, setiap tahunnya 250 m<sup>2</sup> lahan (berupa rawa-rawa, lahan pertanian ataupun hutan) berubah fungsi menjadi daerah pemukiman atau industri. Konversi lahan merupakan hal mendasar karena kalau itu tidak diperhatikan dengan serius akan sia-sia masalah ini kita bicarakan. Karena mungkin 20 tahun lagi tidak ada lagi lahan pertanian sehingga tidak ada lagi

gunanya membicarakan masalah teknologi dan sebagainya tentang pertanian kalau kita tidak mempunyai lahan.

Saya sepakat dengan usul Bapak Bowo dan Bapak Dedi mengenai tata ruang dengan pendekatan ekologis. Masalah tata ruang terkait dengan masalah pemerintah. Apakah pemerintah mau betul-betul serius, bahwa tata ruang merupakan landasan hukum yang dalam mengelola desa/kota sehingga permasalahan pertanian berubah menjadi pemukiman atau industri tidak akan ditemukan lagi.

Berhubungan dengan *main side* yang ada di masyarakat kita yang tidak menghormati profesi petani dan hasil-hasil pertanian. Kita melihat semena-mena orang menawar harga produk pertanian yang tidak masuk akal, sehingga petani dikatakan sebagai pengusaha yang merugi.

Profesi petani di Indonesia masih belum dihargai oleh masyarakat, tidak seperti halnya di Jepang. Sangat sulit apabila ingin ketahanan pangan apabila hal-hal real yang ada di depan kita tidak kita benahi secara menyeluruh. Ini tidak hanya masalah pertanian saja tetapi dari semua sektor dan semoga Bappenas bisa mendorong sektor lain untuk memperhatikan masalah tata ruang. Menperindag juga melihat jangan sampai kita memperdayakan orang yang bergerak di bidang pertanian karena selama ini mereka lebih banyak diperdayakan.

#### 5. Bobby (UGM):

Ada tiga aspek yang harus digarisbawahi untuk melihat ini secara komprehensif:

1. Secara struktural persoalannya adalah pentingnya *landreform* (seperti diperhatikan oleh Jepang dan Philipina). Mungkin kalau nanti akan mengadakan workshop lagi bisa dijadikan topik untuk dieksplore. Dan seberapa jauh teman-teman yang ada di KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) telah bergerak yang sudah sampai drafting pada *level grass root*, ada baiknya mereka diajak berdiskusi mengenai agenda-agenda KPA.
2. Tataran instrumental, ini sejak diskusi tidak banyak dieksplore. Menyinggung peran Departemen Pertanian saya rasa menarik, dalam hal ini pertanyaan besar kita seberapa jauh 'dosa-dosa' ataupun 'amal-amal' yang telah diperbuat oleh Deptan. Ini harus dievaluasi secara kritis tanpa menyalahkan salah satu pihak.
3. Tataran kultural sangat jelas bahwa penguatan institusi lokal sudah merupakan agenda. KPA sudah melakukan advokasi yang memberdayakan bukan memperdayai kelompok-kelompok petani. Salah satu *role* bagi Deptan *entry point* nantinya bukan memperkuat sarana produksi dsb, tapi mungkin pengembangan capital dari petani yang *powerless* atau tidak punya akses. Ini menarik juga untuk dijadikan bahan workshop. Jadi workshop I mengenai landreform, workshop II mengenai

peran atau reformasi Deptan, workshop III adalah penguatan institusi petani.

Menggaris bawahi pendapat Bapak Dedi bahwa untuk melihat permasalahan tidak harus secara sektoral, mungkin diperlukan pendekatan wilayah walaupun konsep pengembangan wilayah saat ini masih menjadi pertanyaan besar. Misalnya, Bapak Tony Firman mengatakan bahwa dari *local economic development*, tapi mungkin dari *Urban Rural Linkages* masih menjadi isu yang sangat penting.

6. Bayu Krisnamurthi (moderator) :

Pemah saya usulkan kepada Bapak Bungaran bahwa eselon I di Deptan harusnya 3 yaitu ; [1] Karantina, [2] Badan pengembangan SDM, [3] Badan riset. Tapi hal ini belum berhasil.

7. Santun (Tanah-IPB)

Permasalahan penting sehubungan dengan ketahanan pangan di negara kita yaitu kebijakan harga pemerintah yang menyebabkan petani tidak terobsesi untuk melakukan suatu kegiatan yang bisa mendukung ketahanan pangan. Kebijakan ini cenderung lebih menguntungkan konsumen daripada produsen. Apabila ini masih dilakukan suatu saat nanti petani kita yang sekarang memproduksi bahan pangan atau beras akan beralih. Kita bisa lihat di beberapa propinsi banyak yang beralih dari tanaman padi menjadi tebu atau tembakau dsb. Ini belum dikemukakan Pak Dedi, setuju atau tidak.

Agenda yang dilakukan oleh Bappenas untuk ketahanan pangan seperti apa? Menurut saya apabila masalah *landreform* atau *land consolidation* adalah kepemilikan, maka kita akan menghadapi masalah yang sangat berat. Dalam beberapa pertemuan boleh saja dilakukan *land consolidation* dalam hal manajemennya. Artinya, kepemilikan dari petani jangan dirubah tetapi beberapa petani dalam manajemennya dikonsolidasikan, sehingga mereka mempunyai suatu skala ekonomi untuk komoditi yang akan dikembangkan.

Belum ada ketegasan mengapa kita tidak ada kesepakatan untuk menunjang ketahanan pangan pengadaan 100 % dalam negeri yang sekarang sudah dibuka kran 5-10 %. Nantinya dikhawatirkan akan dapat melebar sampai 20 % kalau kran ini sudah dibuka. Apabila ada kebijakan 100 % dalam negeri, semua instansi akan berusaha mencapai hal itu dan perekonomian rakyat akan meningkat karena petani akan terobsesi untuk mendapatkan insentif dalam pengadaan ini. Berdasarkan data mengenai *land resource sustainability* terhadap pengembangan pangan, kalau kita kembangkan secara nasional dengan pengertian yang sebenar-benarnya maka kita akan surplus dari yang kita butuhkan. Tadi pagi sudah saya kemukakan suatu contoh persawahan yang kita bangun dulu sekitar tahun 80-an sampai sekarang produksi rata-rata masih di bawah 1 ton. Kalau ini kita tingkatkan 1,5 ton dikalikan 1 juta sudah berapa tambahannya dalam satu masa tanam, apalagi kalau bisa dua kali masa tanam.

Mengenai saran nomor 3 dari Pak Dedi, saya sangat mendukung mengenai kemiskinan struktural dan diupayakan ada peningkatan pendapatan. *Organic*

*farming* dari 1 ha dengan investasi 300 US \$ akan memberikan *return income* 3000 US \$. Berkaitan dengan ini saya setuju bahwa untuk mengatasi degradasi lingkungan, mau tidak mau pendapatan petani harus ditingkatkan. *Organic farming* dapat dijadikan salah satu alternatif karena harga di pasaran dunia sangat tinggi sebagai salah satu bahan pengadaaan pangan mungkin bisa untuk domestik ataupun ekspor.

#### 8. Hermanto Siregar (Sosek-IPB) :

Sudah saatnya ada pajak lingkungan, khususnya untuk produk-produk yang kita ekspor ke luar negeri. Artinya semata-mata tidak dibebankan kepada masyarakat Indonesia atau pemerintah. Kita perlu memikirkan mekanisme sehingga hal itu juga merupakan tanggung jawab masyarakat dunia, khususnya negara konsumen.

Kaitan dengan 3 kunci lokakarya. Ada pendapat bahwa degradasi lingkungan yang terburuk adalah *poverty*/kemiskinan. Inti masalah (seperti yang dikatakan Pak Parulian) adalah pertumbuhan penduduk, yaitu masyarakat miskin itu sendiri. Menurut saya, fokusnya adalah melakukan *poverty aluviation* dengan pendekatan lingkungan (seperti yang dikemukakan Pak Bowo) atau dari sudut pandang *endogenous technology*, yaitu merespon dengan memberikan teknologi yang diperlukan.

Kalau kita sepakat 3 kata kunci itu saling mengkait, yang menjadi pertanyaan: " Apakah pemerintah memiliki kerangka yang gamblang untuk mengatasi hal ini? Adakah ukuran-ukuran tertentu yang bisa dikuantitatifkan? Misalnya ; Apabila

tekanan penduduk 1,5 juta % per tahun, bagaimana dampaknya terhadap kebutuhan pangan? Bagaimana dampaknya terhadap jumlah orang yang akan jatuh ke dalam garis kemiskinan? Bagaimana konsekuensinya yang harus dikejar untuk berbagai komoditi?" Ini merupakan hal penting yang perlu kita sediakan apabila belum ada.

#### 9. Budi (Unpad):

Ada persoalan kebijakan makro dan mikro yang saling bertentangan, bahkan ada kebijakan yang menimbulkan persoalan. Persoalan yang kita hadapi sebenarnya terkait dengan hal-hal yang sudah parsial. Ada satu contoh kalau ketahanan pangan memerlukan perluasan lahan. Di Jawa Barat terdapat pihak ingin memperluas 45 % dari kawasan Ciliwung yang semula hutan. Artinya pada satu sisi ada kebutuhan pangan dan sisi yang lain perlu konservasi. Hal ini akan berat kalau pun dikatakan reformasi agraria merupakan suatu bagian. Dalam realitanya sulit karena banyak kepentingan politik maupun pribadi. Internet, web, koran dapat menjadi media penyebarluasan informasi karena pihak di Jawa Barat perlu mengetahui tentang persoalan-persoalan konservasi seperti itu. Dari semua itu saya sepakat bahwa pendekatan harus integratif.

Mengenai homogenisasi lahan, persoalannya adalah terdapat tipe-tipe tata guna lahan yang secara ekonomi tidak menguntungkan. Perlu dipikirkan bagaimana meningkatkan lahan semacam ini, sehingga tidak perlu digusur untuk dialihkan menjadi lahan yang dalam jangka pendek produktivitasnya tinggi tetapi rentan.

10. Ratna (Direktur Direktorat Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga ,  
BKKBN) :

Masalah ketahanan pangan terkait dengan *policy* kita bahwa secara nasional beras adalah makanan pokok kita. Barangkali kita harus kembali pada *capability* dari masing-masing daerah, misalnya Ambon yang makan sagu atau Madura makan jagung sekarang kita galakkan lagi.

Dalam rangka ketahanan pangan kita harus meningkatkan advokasi dan KIE. Hal yang dapat kami lakukan adalah bagaimana keluarga-keluarga ini dapat menggunakan lahan yang ada sesempit mungkin untuk ditanami tanaman yang dapat dimakan, memelihara ayam atau ikan untuk dikonsumsi. Dalam sebuah diskusi ada pendapat bahwa misalnya seorang anak yang semenjak SD memelihara satu ekor ayam maka kemampuan ketahanan pangan akan dapat diatasi. Saat ini ada kecenderungan penggunaan halaman di perkotaan hanya untuk estetika saja sehingga perlu advokasi KIE supaya *landscape* digunakan untuk tanaman produktif.

Perubahan perilaku diperlukan dalam kaitan lingkungan, misalnya mendorong anak-anak untuk cinta lingkungan melalui lagu-lagu. Perlu pengelolaan sampah dengan 3 R (*recycle, reuse, reduce*).

11. Yuyu (Disperta Pemdakot Bogor) :

Apakah program peningkatan sumber daya manusia petani dalam rangka otonomi daerah masih dilanjutkan? Sangat susah rasanya apabila petani gurem akan

menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan produksi pangan terutama beras atau karbohidrat lain. Adanya *organic farming* dengan lahan sempit harus dimulai dari sumber daya manusia.

Bantuan modal kepada petani bukan meningkatkan taraf hidup petani bahkan ' mengacaukan' misalnya KUT yang dianggap gagal atau KKP yang belum bisa dilaksanakan.

## 12. Disperta Cianjur

Kepemilikan luas lahan di Jawa Barat rata-rata 0,2 dan tantangan yang ada di daerah adalah nilai tukar dari hasil pertanian yang masih rendah. Petani tidak membutuhkan penjelasan masalah menaikkan produksi pertanian untuk mencukupi konsumsi, tetapi hanya memerlukan jawaban bagaimana nilai tukar hasil produksi bisa mencukupi kebutuhan. Ada komoditas yang memiliki nilai tukar hasil tinggi tetapi tidak menyentuh petani. Jadi, hal mendasar bagi petani adalah produk mereka tidak dihargai dan masalah pasar. Misalnya, banyak petani bunga di Cianjur yang inputnya tinggi dan teknologi baik, tetapi nilai tukar dari ekspor yang diterima sangat rendah.

Pemda berusaha mendekatkan petani dengan pasar dan ini mungkin ada *policy* dari pemerintah dalam membantu pemasaran.

Masalah penduduk memang seperti ' ayam dan telur' . Sebagai saran untuk BKKBN agar kegiatannya ditingkatkan kembali.

Diusulkan agar penyediaan beras dapat dilakukan sendiri. Hal ini penting bagi petani adalah insentif dari hasil produksi, sehingga tidak heran apabila banyak generasi muda cenderung untuk pergi ke kota karena pendapatan di luar pertanian lebih baik.

Permodalan untuk petani kadang tidak sampai pada petani sendiri, karena terkadang harus melalui mitra atau lainnya.

Mengenai pola konsumsi, Bapak Menteri perlu kampanye misalnya melalui media televisi.

**Tanggapan:**

Dr. Deddy Masykur (Bappenas) :

Ketahanan pangan tidak hanya di pertanian saja. Saya rasa untuk pendekatan-pendekatan lain telah dilakukan di beberapa tempat. Pendekatan itu dalam hal pertanian secara keseluruhan tapi dengan pendekatan kawasan sektor produksi, walaupun sangat susah apabila pembicaraannya dari sektor-sektor. Misalnya PARUL (*Poverty Alluviation Rural and Urban linkages*) yang kemudian dikembangkan *local economic development*. Permasalahan egosentoral sebenarnya banyak muncul di daerah. Saya kira belum ada satu Bapeda pun yang melakukan diskusi antar bidang satu dan dua dalam Bapeda mengenai pengembangan suatu wilayah. Pendekatan yang harus dilakukan adalah melihat paradigma apa yang terbaik dan diinginkan masyarakat, lalu dilihat apa yang bisa dikembangkan sesuai *cooperative advantages*. Masalah yang dihadapi Deptan

pada awal 80-an adalah terkotak-kotaknya atas dasar komoditi. Menjelang Repelita VI susah untuk merubah ketika diminta melakukan pendekatan lain.

Kita harus solistik, masalah perubahan perilaku dan institusi lokal saya kira benar. Banyak ahli sosial-budaya mengatakan bahwa, " Banyak kesalahan pendekatan pembangunan dari sisi sosial" . Namun, ahli hanya bisa melihat yang telah terjadi dan kesalahannya apa, tanpa melihat bagaimana plan, agenda dan rekayasanya.

Transportasi konversi lahan erat sekali kaitannya. Saya melihat aspek konversi lahan sebagai salah satu hal penting. Daerah Jawa memiliki daya dukung tinggi (kesuburan, produksi, produktivitas) tetapi perlu dipertanyakan bagaimana dengan jangka waktu ke depan? Daya dukung berhubungan dengan manajemen dimana 60 % penduduk tinggal di Jawa, sedangkan wilayahnya hanya 6 % dari seluruh daratan. Namun tidak mudah memindahkan jaringan irigasi ke luar Jawa yang dahulu dilakukan Belanda untuk mengembangkan tebu.

Sepakat mengenai masalah tata ruang. Disini perlu peran lembaga kemasyarakatan bisa mendorong dan membantu untuk advokasi, misalnya jangan sampai sawah-sawah kelas I nanti berubah. Perubahan *zoning* seyogyanya melalui sistem musyawarah dalam masyarakat tetapi hal ini biasanya ditentukan sepihak oleh pemerintah. Model-model seperti itu harus di dorong karena pada dasarnya merupakan perubahan dari ekonomi menjadi *ecologi and economic*.

Posisi petani sangat lemah dapat dibenarkan dan masalah penghargaan sebenarnya harus datang dari konsumen.

Sependapat dengan Pak Bobby, tidak hanya melihat secara sektoral dan intinya peran Deptan dapat dicoba untuk bersatu kembali. Sudah dilakukan upaya untuk tidak melihat lagi secara sektoral, misalnya di regional dan sumber daya alam telah melakukan mengadvokasi kepada pemda saat mempersiapkan otda. Dalam rangka otda dimana keuangan berada di daerah-daerah, Pemda harus diajak berfikir ke arah sana. Pemda diberikan pengarahan bahwa walaupun dengan siklus tahunan (LPJ), daerah harus bisa memberikan yang berdampak jelas. Dengan pendekatan pengembangan kawasan sentra produksi seperti PARUL dan sebagainya di beberapa daerah setidaknya sudah mulai muncul kerjasama dengan pendekatan agribisnis antara usaha besar dan usaha kecil dan petani. Mudah-mudahan apabila ada kesatuan antara usaha tani tersebut tidak dibohongi lagi karena level manajemen di tingkat mikro dapat menentukan. Berkaitan dengan hal-hal di atas pendekatan lokal sangat penting sekali.

Menanggapi Pak Santun, saya tidak berani menentukan untuk kebijakan harga yang saat ini masih ramai dibicarakan. Bayang-bayang swasembada beras masih kuat dan berkaitan dengan pengamanan-pengamanan pangan dan sebagainya. Tetapi kenyataan yang ada apakah kita berani mengatakan swasembada pangan sehingga 100 % dalam negeri. Hitungan diperlukan untuk menunjukkan terutama bila ada kecenderungan-kecenderungan banjir dan sebagainya, sehingga muncul masalah impor atau tarif kuota. Hal menarik bahwa beras kita 230 US \$ per ton atau lebih dan Thailand 150 US \$ (bukan dumping). Mengapa disana bisa dianggap bagus dan kita tidak? Barangkali masalahnya terdapat di rantai tata niaga karena yang untung bukan di level produsen tapi penjual.

Intinya ketahanan pangan tidak hanya masalah beras. Perlu ada upaya untuk mengarahkan advokasi kepada masyarakat dan hasilnya tidak akan terlihat jangka pendek. Dahulu akan gengsi kalau tidak makan nasi sehingga perlu perubahan pandangan kembali. Sudah ada upaya diversifikasi, misalnya dalam kunjungan resmi disediakan 2 macam makanan dan yang diperbanyak adalah makanan lokal.

Masalah tata ruang muncul kebanyakan secara makro. Seolah-olah dalam garis batas kawasan lindung sudah tidak ada lagi di dalamnya, padahal dari segi mikro tidak demikian.

Berkenaan dengan masalah perilaku, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menginginkan prioritas pembangunan 2003 adalah etika. Tetapi apa yang harus dilakukan dan digariskan kembali ' seperti apa masalah perilaku itu?' BKKBN bisa menggunakan keahliannya untuk membahas hal ini.

Masalah *organic farming* sudah ada usulan tetapi dihadapkan pada angka-angka yang besar sehingga takut akan pengalaman satu juta hektar. Apakah ada *demand* yang sebesar itu? Apakah dengan *supply* seperti itu akan menyebabkan harga semakin rendah, sehingga mengapa tidak dicoba dahulu dengan skala kecil dan dikembangkan lebih lanjut? Walaupun ada yang menyanggupi untuk mem-*back up* pemasaran, apakah betul mampu menampungnya dengan jumlah tersebut?

Nilai tukar memang benar dan hal ini perlu diskusi lanjut harus mulai dari mana, karena dari dulu kita mengetahui permasalahannya. Berdasar telaahan dan data, memang terjadi penurunan sejak tahun 94-96.

### **Adi Suryo Wibowo (PPLH-IPB)**

Masalah institusi lokal dalam desentralisasi jangn tanggung-tanggung. Pada UU nomor 22 mendekatkan keputusan penting dengan pelakunya sehingga institusi lokal punya peran penting kemudian hari. Hal penting dalam institusi lokal adalah peranan masyarakat adat yang sejak 30 lebih tahun terakhir karena pengaruh kuat negara maka terputus tatanan adatnya. Di beberapa tempat mulai diupayakan revitalisasi melalui LSM dan kesadaran diri dari tetuanya (ditulusuri dan diikatkan kembali). Ini bukan upaya mudah, tetapi di beberapa tempat yang sudah mulai tumbuh lagi dalam prosesnya terjadi peningkatan semangat untuk menjaga sumber daya alam. Misalnya di Krui-Lampung Barat yang pertama kali diakui pemerintah.

Tata ruang adalah milik publik sehingga seharusnya publik harus ikut serta dalam penetapannya yang saat ini dilakukan satu pihak oleh pemerintah (kalau lebih spesifik yang mengerjakan adalah konsultan). Beberapa ada keputusan menteri mengenai petunjuk penyusunan tata ruang akan dirubah, yaitu terdapat tata ruang partisipatif. Yang perlu ditanyakan adalah, ' bagaimana pelaksanaannya?' Di Inggris, tata ruang diikuti dan ditegakkan oleh masyarakat bagi yang akan bangun rumah, jual rumah atau jual tanah (tapi jual tanah untuk keperluan dipakai rumah tidak boleh). Terjadi pemadatan di pemukiman kota tetapi jelas batasan daerah kota dan pedesaan. Hal ini tidak hanya bisa pemerintah tapi harus semua pihak sehingga harus kita buat bahwa tata ruang adalah milik publik.

Ada tiga tataran, tataran paradigma yang paling bawah harus dirubah. Yang dikatakan Pak Dedi tadi adalah holistik. Apabila kita mulai desentralisasi dan kita

bicarakan integral agar tidak sektoral, maka itulah ciri-ciri *main side* kita berubah ke paradigma ekologi. Jadi menurut saya paradigma ekologi tidak hanya diterjemahkan, tetapi hal penting adalah persepsi kita dalam melihat persoalan jangan sektoral, holistik, integratif, desentralisasi. Memang mungkin di satu tempat pendekatan DAS atau *bio-region* sangat cocok, tetapi di wilayah lain mungkin perwilayahan persekutuan adat. Hal ini disebut kemajemukan mendekati persoalan yang tidak selalu homogen.

Mengenai KPA, saat ini disetiap propinsi memiliki konsorsium-konsorsium pembaharuan agraria. Pada tanggal 23-28 kemarin kongres KPA di Garut untuk memilih sekjen yang baru dan berhasil membuat advokasi penyadaran tentang hak-hak penguasaan negara. Di dalam pasal 33 UUD adalah hak menguasai negara, bukan hak memiliki. Dan sebaliknya masyarakat adat juga atau sebagian besar tatanan tradisi kita adalah hak menguasai, bukan memiliki. Kesadaran ini dibangun ada yang dulu tanahnya digunakan untuk PTP atau pertambangan, tetapi mereka hanya sampai pada klaim akhirnya. Sehingga tanah masyarakat semula diambil sepihak terdapat premial klaim atau klaim tahunan, dimana kalau ada perubahan susunan politik akan klaim ulang. Tidak ada perubahan mendasar karena diperlukan komitmen politik dalam negara/pemerintah untuk menindaklanjuti. Salah satu titik awal adalah Undang-Undang PSDA, Tap MPR tentang reformasi agraria dan pemanfaatan sumber daya alam. Efek KPA adalah [1] pengajaran pada banyak desa-desa dan [2] klaim tanah. Setelah dievaluasi terakhir, hal ini belum ada perubahan yang serius.

Kalau Agraria adalah lapis kedua setelah ada paradigma ekologi (ini strukturalnya) salah satu paket agendanya adalah soal-soal reformasi agraria. Nilai tukar menurut saya pada tataran struktural. Baru hal-hal yang instrumental seperti pertanian *organic* atau *Low External Input Sustainable agriculture (LEISA)*, yang sebenarnya di Indonesia sangat banyak pertanian organik, hanya saja yang dikenal adalah 'modern lebih baik dari tradisional' .

Sharing dengan Pak Santun, yang di tata dalam landreform tidak soal kepemilikan tetapi penguasaan. Dan di masyarakat tradisi dan daerah banyak dijumpai mereka bukan memiliki, dimana milik adalah institusi baru yang masuk dengan adanya modernisasi. Ada pengertian tanah milik yang sebelumnya tanah itu adalah tanah yang dikuasai secara komunal dan kemudian komunitas ini memberikan/menguasakan sebagian kepada individu untuk menggarap, kemudian kembali ke komunal. Hal ini belum ditata setelah ada UU pokok agraria sehingga banyak terjadi konflik antar tanah. Apabila ini diperbaiki maka akan banyak memberi sumbangan kepada pencapaian produksi pertanian kita, tentu dengan prinsip yang lain tadi harus kita pakai.

Sedikit berbeda pendapat dengan Pak Hermanto, apabila degradasi yang terburuk adalah karena kemiskinan, menurut saya kemakmuran atau *lifestyle* menjadi kaya jauh lebih banyak merusak sumber daya alam. Kemiskinan merusak untuk kebutuhan makan, tetapi apabila kita lihat kerusakan sumber daya alam terutama hutan tidak hanya didorong oleh kemiskinan. Contoh kebijakan ekspor kayu

mendorong *deforestresy*, dan hal ini tidak berpengaruh terhadap pengusaha besar asalkan terpenuhi *income* dan *profit*.

Menanggapi Pak Budi, mengapa di Jawa Barat meminta diperluas 45 %? Ini harus dilihat karena ada keinginan supaya masyarakat bisa mengelola sumber daya alam yang semula dikuasai masyarakat sehingga ini merupakan permasalahan agraria. Pemahaman menguasai dan bukan memiliki harus diletakkan pada prosesnya.

Setuju dengan Ibu Ratna bahwa mengenai sampah terkait dengan perilaku individu dan bukan harus dari pemerintah. Sehingga, apabila berbicara banjir di Jakarta merupakan kumpulan eksternalitas negatif yang dilakukan oleh individu-individu dari mulai hulu dan hilir. Masalah tehnik tidak akan menyelesaikan masalah. Saya setuju tentang 3R dan bahkan 5R, yaitu ; *replacement, recovery, recycle, reduce dan reuse*. Hal itu perlu disosialisasikan melalui proses pendidikan dan kita buat bahwa sampah adalah uang bukan ongkos seperti perubahan paradigma pada beberapa perusahaan besar tentang limbah.

**Parulian (PPLH-IPB):**

Pemerintah melakukan karena bodoh atau melakukan hal yang lebih baik baik individu maupun kolektif. Misalnya kembali ke sagu, maka harus dilihat lagi perlukah fungsi Bulog atau penetapan harga dasar gabah.

Landreform diperlukan apabila sebagai akses vital untuk *economic survival*. Persoalannya adalah untuk apa pemerintah melakukan landreform kalau itu merupakan ancaman.

### Moderator

Permasalahan seperti ini tidak hanya dapat diselesaikan dengan satu workshop tetapi memang kita perlu menyuarkan.

Kita bisa sepakat bahwa kondisi pertumbuhan penduduk harus dengan serius diantisipasi karena memberikan tekanan pada degradasi sumber daya alam dan hal tersebut memberikan ancaman pada ketahanan pangan.

Pembicaraan masalah penduduk, sumber daya alam dan pangan bukan hal yang baru. Hanya tampaknya perlu diaktualisasi karena sebagian orang mulai lupa dengan hal itu. Aktualisasi dapat berupa : [1] Aktualisasi di tingkat paradigma, misalnya : pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi, pergeseran dari yang semula *government oriented* mulai kepada aspek-aspek lain, dimana pemerintah bukan hanya *superior body* tapi banyak hal yang harus diperhatikan, pergeseran dari sektoral menjadi komprehensif dan holistik. Paradigma ini harus kita gulirkan terus. [2] Perlu kita aktualisasi penduduk, sumber daya alam dan pangan dalam kaitannya dengan reformasi agraria, pengembangan institusi lokal, pengembangan sumber daya manusia, atau pengembangan *human capital* dan kemajemukan. [3] Aktualisasi di tingkat instrumental; Pada level ini yang paling penting adalah penghormatan dan penguatan kita pada tata ruang, pemanfaatan lahan kering.

Melihat posisi kita dalam konteks membuat *public awareness* dan *support*, maka kita coba bersama mengkomprehensikan pandangan kita ke depan dalam jangka panjang tentang tiga hal yaitu :

1. Keseimbangan pangan ; bagaimanakah skenerio untuk perhitungan kita mengenai ketahanan pangan. Bagaimana dengan produksi, konsumsi dan sebagainya.
2. Penduduk ; Dengan data tahun 2000 kita bisa bayangkan jika 1,5 % Indonesia, bagaimana dengan Bogor atau Cianjur? Pernahkah kita membicarakan dan menyebarkan kepada masyarakat. Misalnya Bogor sekian dan implikasinya kita butuh sekian rumah, sekian luas lahan untuk rumah kita butuh sarana transportasi, butuh pangan sekian banyak dan seterusnya.
3. Degradasi sumber daya alam ; Bagaimana dengan sumber daya alam apabila penduduk dan ketersediannya seperti ini ?

Dengan hal itu kita bisa membangun *awareness* dan mungkin pemda dapat dibantu untuk melihat masalah itu dan apa solusinya. Kita di Perguruan tinggi bisa melakukan agenda safari dengan *net work* masing-masing untuk membangun *awareness*. Kita mengajak pemda lebih lanjut membicarakan hal ini lebih konkret bagi daerahnya masing-masing. Akhimya kita harus bisa memberikan alternatif lain yang lebih jangka panjang untuk pemerintah.